

1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

Perkembangan inflasi di Kabupaten Bintan secara umum berada dalam kondisi relatif terkendali, meskipun masih dihadapkan pada tekanan harga pada sejumlah komoditas pangan strategis. Dinamika harga di daerah dipengaruhi oleh faktor musiman, kondisi pasokan dari luar daerah, serta meningkatnya aktivitas ekonomi dan konsumsi masyarakat.

Perkembangan inflasi di Kabupaten Bintan berada dalam kondisi relatif terkendali, meskipun terdapat peningkatan risiko tekanan harga pada beberapa komoditas pangan strategis. Perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting (Bapokting) menunjukkan fluktuasi terbatas, khususnya pada komoditas volatile food seperti beras, cabai, bawang, daging ayam ras, dan telur ayam ras yang dipengaruhi oleh faktor cuaca, pasokan dari luar daerah, serta peningkatan permintaan musiman. Namun demikian, ketersediaan pasokan di pasar secara umum masih terjaga dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat.

Sementara itu, harga barang lainnya dan jasa pada Triwulan III Tahun 2025 relatif stabil, meskipun terdapat penyesuaian terbatas pada kelompok jasa dan transportasi seiring meningkatnya mobilitas dan aktivitas ekonomi masyarakat. Stabilitas inflasi daerah didukung oleh penguatan peran Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Bintan melalui implementasi strategi 4K, yaitu keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif. Risiko ke depan yang perlu diantisipasi antara lain potensi gangguan distribusi akibat cuaca ekstrem, fluktuasi harga komoditas pangan strategis, peningkatan permintaan pada periode tertentu, serta kenaikan biaya logistik wilayah kepulauan. Oleh karena itu, TPID Kabupaten Bintan akan terus memperkuat stabilisasi pasokan dan harga, pengendalian komoditas volatile, serta sinergi lintas sektor guna menjaga inflasi tetap terkendali dan daya beli masyarakat.

2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

Beberapa permasalahan pengendalian inflasi di Kabupaten Bintan pada Triwulan III

Tahun 2025 antara lain:

- 1. Fluktuasi Harga Komoditas Volatile Food**

Komoditas pangan strategis seperti cabai, bawang, daging ayam ras, dan telur ayam ras mengalami fluktuasi harga akibat faktor musiman dan kondisi cuaca.

- 2. Ketergantungan Pasokan dari Luar Daerah**

Ketersediaan sebagian besar komoditas pangan masih bergantung pada pasokan dari luar Kabupaten Bintan, sehingga rentan terhadap gangguan distribusi dan dinamika harga daerah pemasok.

- 3. Biaya Distribusi dan Logistik Wilayah Kepulauan**

Karakteristik geografis wilayah kepulauan menyebabkan biaya distribusi relatif tinggi dan

berpengaruh terhadap harga di tingkat konsumen.

4. Peningkatan Permintaan Masyarakat

Meningkatnya aktivitas ekonomi dan konsumsi masyarakat pada Triwulan III berpotensi mendorong tekanan harga apabila tidak diimbangi dengan kecukupan pasokan.

3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di Kabupaten Bintan pada triwulan III tahun 2025. Beberapa kegiatan di triwulan III ini terkait pengendalian inflasi sebagai berikut:

1. Pemantauan Harga dan Ketersediaan Pasokan

Pelaksanaan pemantauan harga secara rutin terhadap komoditas pangan strategis dan barang kebutuhan pokok dan penting di pasar-pasar utama guna mendeteksi potensi kenaikan harga sejak dini.

2. Operasi Pasar dan Stabilisasi Harga

Pelaksanaan operasi pasar dan kegiatan stabilisasi harga pada komoditas tertentu untuk menekan fluktuasi harga dan menjaga keterjangkauan harga bagi masyarakat.

3. Penguatan Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID)

Peningkatan koordinasi lintas perangkat daerah, instansi vertikal, serta pemangku kepentingan terkait untuk menjaga kelancaran distribusi dan kecukupan pasokan.

4. Pengendalian Komoditas Volatile Food

Fokus pengendalian pada komoditas pangan yang bersifat volatile melalui pengawasan distribusi dan intervensi harga secara terbatas dan terukur.

5. Komunikasi dan Sosialisasi kepada Masyarakat

Penyampaian informasi kepada masyarakat dan pelaku usaha terkait perkembangan harga, ketersediaan pasokan, serta upaya pengendalian inflasi yang dilakukan pemerintah daerah.

4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

1. Evaluasi Perkembangan Harga dan Inflasi

- Berdasarkan hasil pemantauan harga harian dan mingguan, terjadi fluktuasi pada beberapa komoditas strategis seperti beras, cabai, daging ayam ras, dan telur ayam ras.
- Kenaikan harga bersifat temporer dan masih dalam batas terkendali.
- Tidak terdapat lonjakan harga ekstrem yang berdampak signifikan terhadap daya beli masyarakat.

Secara umum, pengendalian inflasi daerah berjalan efektif dan selaras dengan target inflasi nasional.

2. Evaluasi Pelaksanaan Strategi 4K

- Keterjangkauan Harga
- Operasi pasar dan pasar murah berjalan tepat sasaran.
- Monitoring harga di pasar tradisional dilakukan rutin.
- Intervensi harga ayam ras cukup efektif menekan lonjakan harga.

Hasil evaluasi: Mekanisme intervensi cepat (rapid response) sudah berjalan baik, namun perlu peningkatan frekuensi operasi pasar pada komoditas hortikultura.

3. Ketersediaan Pasokan

- Koordinasi dengan distributor dan agen berjalan lancar.
- Pasokan relatif aman meskipun sebagian besar masih bergantung pada daerah pemasok luar Bintan.

Hasil evaluasi: Stok dalam kondisi aman, tetapi perlu penguatan cadangan pangan daerah sebagai buffer stock.

4. Kelancaran Distribusi

- Distribusi antar wilayah relatif lancar.
- Hambatan distribusi lebih disebabkan faktor cuaca dan transportasi laut.

Hasil evaluasi: Perlu optimalisasi koordinasi dengan Dinas Perhubungan untuk memastikan kelancaran distribusi antar pulau.

5. Komunikasi Efektif

- Rapat koordinasi TPID rutin dilaksanakan.
- Penyampaian informasi harga kepada masyarakat cukup transparan.

Hasil evaluasi: Komunikasi publik sudah baik, namun perlu penguatan edukasi belanja bijak dan pengendalian panic buying.

5. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di Kabupaten Bintan, maka Pemerintah Kabupaten Bintan merekomendasikan beberapa kebijakan pengendalian inflasi kepada Pemerintah Pusat sebagai berikut:

1. Pemberian dukungan subsidi transportasi/logistik bagi daerah kepulauan, mengingat tingginya biaya distribusi bahan pokok yang berpengaruh langsung terhadap pembentukan harga di tingkat konsumen.
2. Penguatan peran Bulog dalam stabilisasi harga dan pasokan pangan di wilayah Kepulauan Riau, khususnya untuk komoditas beras, gula, dan minyak goreng, melalui penambahan alokasi stok dan percepatan distribusi.

Penambahan alokasi Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) untuk daerah kepulauan

3. sebagai langkah antisipatif dalam menghadapi fluktuasi harga dan gangguan pasokan.
4. Kebijakan stabilisasi harga pangan nasional yang mempertimbangkan karakteristik geografis wilayah kepulauan, termasuk fleksibilitas mekanisme distribusi dan intervensi pasar.
5. Dukungan anggaran melalui Dana Insentif Daerah (DID) atau skema khusus pengendalian inflasi, guna memperkuat pelaksanaan operasi pasar, subsidi distribusi, serta penguatan cadangan pangan daerah.
6. Penguatan kebijakan pengembangan produksi pangan nasional berbasis wilayah, khususnya dukungan sarana prasarana pertanian, peternakan, dan perikanan bagi daerah yang memiliki potensi produksi lokal.
7. Pengembangan sistem informasi harga dan distribusi pangan terintegrasi secara nasional, sehingga daerah dapat mengakses data pasokan dan harga secara real time untuk mendukung pengambilan kebijakan berbasis data.